

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN  
METROLOGI LEGAL**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh

**WULANDARI**

C.100.040.104

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2011**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah Disetujui untuk Dipertahankan di  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. NATANGSA SURBAKTI, SH.M.Hum

KUSWARDANI, SH.M.Hum

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Natangsa Surbakti, SH.M.Hum ( ..... )

Sekretaris : Kuswardani, SH.M.Hum ( ..... )

Anggota : Sudaryono, SH.M.Hum ( ..... )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(M. IKSAN, SH.M.Hum)

## **MOTTO**

### **Kahlil Gibran**

**“Ketika engkau gembira lihatlah ke dalam hatimu dan engkau akan melihat bahwa engkau tengah meratapi sesuatu yang pernah menjadi kebahagiaanmu.”**

### **Kahlil Gibran**

**“Akal dan belajar itu seperti jiwa raga, Tanpa raga, jiwa adalah udara hampa.**

**Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tanpa makna.”**

### **H.R. MUSLIM**

**“Apabila kamu tertimpa Musibah, jangan katakan, “anda saja aku melakukan ini dan itu”. Karena kata “seandainya” merupakan pintu perbuatan syaitan.**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Bunda yang memberi kasih sayang tiada henti.
- Keluarga kecilku dan kakak-kakak serta adikku tersayang yang telah memberi motivasi dan dukungan.
- Almamaterku

## ABSTRAKSI

Metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran, sementara legal adalah suatu keabsahan yang mempunyai kekuatan hukum jadi metrologi legal adalah suatu ilmu yang mempelajari pengukuran yang distandarkan oleh standar nasional ukur. Hal-hal yang berkaitan dengan metrologi diatur dengan Undang-undang no. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-undang ini mengatur hal-hal mengenai perbuatan, pengedaran, penjualan, pemakaian, dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya.

Metrologi juga dapat diartikan suatu ilmu yang mengelola satuan-satuan ukuran,metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran, sedangkan metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

Tujuan utama metrologi legal adalah menjamin terlaksananya pengukuran yang benar bagi warga negara bilamana pengukuran itu dilakukan dalam transaksi resmi dan niaga dan yang kedua berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Di luar lingkup metrologi legal, ada juga peraturan-peraturan lain yang mengharuskan dilakukannya pengukuran untuk menguji kesesuaian dengan peraturanya, misalnya penerbangan, lingkungan dan pengendalian pencemaraan.

Berdasarkan hal itu maka terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan yakni bagaimana alasan yang mendukung tindak pidana metrologi legal, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi praktek

penyimpangan metrologi legal dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktek penyimpangan metrologi legal.

Sementara pengertian penegak hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tentu saja penulis amat menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini telah melalui berbagai macam bimbingan, diskusi, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengungkapkan penghargaan kepada mereka yang telah memberi kontribusi atas terselesaikannya karya ini.

1. M. Iksan SH.M.Hum, selaku Dekan Fakutlas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dr. Natangsa Surbakti, SH.M.Hum, selaku pembimbing pertama skripsi ini yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta memberikan petunjuk dan nasehat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kuswardhani, SH.M.Hum, selaku pembimbing kedua skripsi ini yang telah memberi nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Teruntuk Ayah, bunda, kakak-kakak dan adikku yang selalu memotivasi aku. Sehingga aku bisa seperti sekarang ini.
5. Teruntuk Tri Agus Santosa dan Satrio Putra Santosa sebagai sumber inspirasi hidupku.



6. Teruntuk sahabat-sahabatku Resti, Wulan Kecil, Wulan Nduut, Aririn, deny, Tutik, Yayuk makasih ya tanpa kalian semua hidupku akan terasa hampa dan aku akan merindukan saat-saat bersama kalian semua.
7. Untuk anak-anak Hukum angkatan 2004 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, aku akan merindukan kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan balasan yang sempurna atas segala budi baik kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha secara maksimal untuk hasil yang terbaik. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Surakarta, November 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                    | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....              | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....               | iii  |
| HALAMAN MOTTO .....                    | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....              | v    |
| ABSTRAK .....                          | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                   | viii |
| DAFTAR ISI .....                       | x    |
| BAB I    PENDAHULUAN .....             | 1    |
| A.    Latar Belakang .....             | 1    |
| B.    Pembatasan Masalah .....         | 10   |
| C.    Perumusan Masalah .....          | 10   |
| D.    Tujuan Penelitian .....          | 11   |
| E.    Manfaat Penelitian .....         | 11   |
| F.    Kerangka Penelitian .....        | 13   |
| G.    Metode Penelitian .....          | 16   |
| H.    Sistematika Skripsi .....        | 20   |
| BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....       | 22   |
| A.    Pengertian Metrologi Legal ..... | 22   |

|   |    |
|---|----|
| B. Tujuan Utama Metrologi Legal dan Peraturan Takar Timbang .....   | 28 |
| C. Tindak Pidana Metrologi Legal .....  | 30 |
| D. Pengertian Penegak Hukum .....   | 35 |
| E. Faktor-faktor Penegakan Hukum .....  | 42 |
| F. Tinjauam Tindak Pidana Metrologi Legal di Boyolali .....   | 48 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 53 |
| A. Penyimpangan Tindak Pidana Metrologi Legal di Kalangan Pedagang .....  | 53 |
| B. Motivasi Pedagang Melakukan Tindak Pidana Metrologi Legal .....  | 64 |
| C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Praktek Penyimpangan Metrologi Legal Baik Secara Preventif maupun Represif ..... | 66 |
| D. Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Metrologi Legal .....  | 77 |
| E. Hambatan dalam Menegakkan Hukum Terhadap Penyimpangan Metrologi Legal .....  | 85 |
| BAB IV PENUTUP .....  | 93 |
| A. Kesimpulan .....   | 93 |
| B. Saran .....  | 94 |

#### DAFTAR PUSTAKA